

BAB V

KESIMPULAN

Indonesia dan Kanada merupakan negara yang multikultural. Kedua negara tersebut terdiri dari suku, bangsa, ras, warna kulit, dsb yang berbeda-beda, juga pengaturan hukum anti diskriminasi ras dan etnis di kedua negara berbeda. Negara Kanada mengatur hukum anti diskriminasi dalam satu undang-undang / peraturan umum (*lex generalis*) yakni *Canadian Human Rights Act* yang berisi ranah apa saja yang dilarang (salah satunya di dalamnya, *race and ethnic or national origin*) serta mengatur anti diskriminasi di berbagai bidang kehidupan sehari-hari yang rentan terjadi pendiskriminasian, seperti bidang kerja, kesempatan kerja, pembedaan upah, dsb. Selain itu mengatur secara rinci mengenai komisi hak asasi manusia Kanada dan apa yang harus dilakukan apabila menjadi korban tindakan diskriminasi ras dan etnis, seperti contohnya bila menjadi korban diskriminasi melaporkan tindakan diskriminasi tersebut pada *Canadian Human Rights Commission* (CHRC) yang sangat berperan besar dalam penegakan hak asasi manusia seperti terlihat dalam *Canadian Human Rights Act* yang sangat mudah dipahami oleh warga negara yang menjadi korban tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Selain dari lingkup diatas, negara Kanada mengatur secara khusus hak etnis minoritas yaitu penduduk asli (*indigenous people*), berupa hak-hak apa saja yang berhak didapatkan oleh penduduk asli dalam *Indian Act* dan Kanada juga mengatur kesempatan kerja yang sama tanpa memandang ras dan etnis dalam *Employment Equity Act*. Kelompok yang dituju dalam undang-undang tersebut yang rentan terjadi diskriminasi adalah penduduk asli, dan kelompok minoritas lain yang tampak, yakni orang yang bukan penduduk asli, bukan ras kaukasia dan tidak berkulit putih.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Employment Equity Act (S.C. 1995, c. 44)

Sedangkan negara Indonesia mengatur hukum anti diskriminasi ras dan etnis dalam dua Undang-Undang, yakni Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi peraturan umum (*lex generalis*) anti diskriminasi ras dan etnis serta berperan dalam penegakan hak asasi manusia, dan Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (*lex specialis*) sebagai peraturan khusus yang mengatur anti diskriminasi dalam bidang ras dan etnis.

Diskriminasi kerap terjadi secara vertikal maupun horizontal, secara horizontal yang terjadi antara sesama warga negara contohnya orang kerap memanggil seseorang bukan dengan nama aslinya melainkan dengan sebutan ras atau etnis mereka yang bernada menghina atau dominasi ras/etnis di bidang atau sektor tertentu. Asumsinya mungkin masyarakat tidak mengetahui apa saja bentuk dari diskriminasi rasial tersebut, atau bahkan masyarakat tidak mengetahui adanya sanksi hukum atas diskriminasi ras dan etnis.¹⁴⁸ Terdapat pula diskriminasi vertikal yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya dalam kasus larangan kepemilikan tanah di Jogjakarta oleh etnis tertentu.¹⁴⁹ Dalam kasus tersebut terjadi penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan diskriminasi secara tidak langsung oleh peraturan yang dibuatnya.

Kesadaran masyarakat Indonesia masih rendah terhadap tindakan diskriminasi ras dan etnis. Menurut komnas HAM masyarakat Indonesia masih ada yang tidak mengetahui adanya sanksi hukum atas tindakan diskriminasi ras dan etnis, baik dalam lingkup pelayanan publik, keagamaan, hak kepemilikan tanah, ketenagakerjaan, dsb.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Dylan Aprialdo Rachman, Kesadaran Publik Atas Diskriminasi Ras dan Etnis Dinilai Masih Rendah, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/17/07005961/kesadaran-publik-terkait-diskriminasi-ras-dan-etnis-dinilai-masih-rendah> (diakses 10 Februari 2019 pukul 20.19)

¹⁴⁹ Mawa Krena, 'Diskriminasi ras' di Yogyakarta: Kenapa keturunan Cina tak boleh punya tanah?, https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161005_majalah_tanah_yogyakarta (diakses 12 Februari 2019)

¹⁵⁰ Dylan Aprialdo Rachman, Kesadaran Publik Atas Diskriminasi Ras dan Etnis Dinilai Maih Rendah, *supra* catatan no 148.

Karena itu pencegahan terhadap diskriminasi ras dan etnis tak luput pula dari peran warga negara maupun kelompok atau organisasi lain dalam kehidupan bernegara. Seperti ditegaskan dalam pasal 11 Undang-Undang no 40 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu setiap warga negara berperan dalam perlindungan dan pencegahan terhadap ras dan etnis.¹⁵¹ Ketentuan tersebut menyatakan agar tidak hanya orang saja yang berperan dalam perlindungan diskriminasi ras dan etnis tetapi meliputi masyarakat luas berupa organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah agar memiliki kesempatan yang sama. Peran tersebut dapat dilaksanakan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka sebagai pelopor dalam meningkatkan toleransi dan keberagaman dalam lingkungan mereka.¹⁵²

Kanada sebagai salah satu negara yang toleran terhadap perbedaan ras dan etnis dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia khususnya dalam bidang ras dan etnis. Seperti yang ditegaskan dalam *Canadian Human Rights Act section 53 subsection 2*, agar tidak melakukan tindakan diskriminatif dan jangan sampai terulang tindakan serupa di masa mendatang, maka Komnas HAM Kanada melakukan tindakan pencegahan. Selain itu juga, memberikan ganti rugi berupa jasa, dalam hal ini dapat berupa layanan, fasilitas, akomodasi sebagai akibat yang ditimbulkan dari tindakan diskriminatif dari bidang tersebut karena korban berhak memperoleh jasa dan hak yang sama.

¹⁵¹ Undang-Undang R.I., No. 40 Tahun 2008, *supra* catatan no 20, pasal 11.

¹⁵² *Id.*, pasal 12.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

De Schutter, Olivier. *International Human Rights Law*. United Kingdom : Cambridge University Press, 2010.

Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, & Uli Parulian Sihoming. *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*. Jakarta : The Indonesia Legal Resource Center, 2009.

J.A., Denny. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi Data, Teori, dan Solusi* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012).

Ritzer, George. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. United Kingdom : Blackwell Publishing Ltd, 2007.

Rhona K.M. Smith , Njäl Høstmælingen at.al--- , *Hukum Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008)

Sukardi Narkit., *The Indonesian Military After The New Order* (NIAS Press Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore, 2005)

Theodorson, George A & Achilles G. Theodorson. 1979. *A Modern Dictionary of Sociology*. (New York, Hagerstown, San Francisco, London: Barnes & Noble Books).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Canada, *Canadian Human Rights Act, 1985.*

Canada, *Constitution Act ,1982.*

Canada, *Employment Equity Act, 1995.*

Convention on the Rights of the Child (adopted 20 November 1989, entered into force 2 September 1990) UNTS vol. 1577

International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR).

Undang-Undang R.I., No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165)

Undang-Undang R.I., No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (L.N.R.I Tahun 2008 No. 170)

JURNAL/ARTIKEL

Ann Sunahara, Japanese Canadian <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/japanese-canadians> (diakses tanggal 29 Oktober 2018 pukul 01.56).

Australian Human Rights Commision, Racial Discrimination Know Your Rights, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/Racial%20Discrimination_2014_Web.pdf (diakses tanggal 18 Oktober 2018 pukul 13.57).

Austalian Human Right Comission “ Human rights and discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity - Addressing sexual orientation and sex and/or gender identity discrimination: Consultation Report (2011)”, diakses dari <https://www.humanrights.gov.au/publications/section-4-human-rights-and-discrimination-basis-sexual-orientation-or-gender-identity>

Bert Heinrichs, What Is Discrimination and When Is It Morally Wrong?,https://www.researchgate.net/publication/236633286_What_Is_Discrimination_and_When_Is_It_Morally_Wrong (diakses tanggal 19 September 2018 pukul 21.25)

Canadian Cultural Mosaic Foundation, “ A Multicultural Canada”, diakses dari <http://www.canadianculturalsmosaicfoundation.com/blog/a-multicultural-canada> (diakses pada 22 Juni 2018 pukul 03.07).

David Welsh, The Rise and Fall of Apartheid. Johannesburg and Cape Town: Jonathan Ball Publishers, 2009 <http://www.lindenwood.edu/files/resources/146-148-2.pdf> (diakses tanggal 29 Oktober 2018 pukul 21.06)

Equality and Human Rights Commission, The Equality Act: Guidance for small businesses Understanding legal definitions of discrimination and unlawful behaviour in the Equality Act https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/ea_legal_definitions_0.pdf (diakses tanggal 30 Oktober 2018 pukul 00.39)

Fathur Rahman, “Mengelola Prasangka Sosial Dan Stereotipe Etnik Keagamaan Melalui Psychological And Global Education”, diakses dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132300169/>

peneliti MEREDAM+PRASANGKA+SOSIAL+DAN+STEREOTIPE+ETNIK.pdf,
f,

Government of Canada, “Rights in the workplace”, diakses dari <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/rights-workplace.html> (diakses tanggal 11 Oktober pukul 20.40).

Ildikó Laki, The concept of discrimination nowadays http://real.mtak.hu/25124/7concept_of_discrimination_nowadays.pdf (diakses tanggal 19 September 2018 pukul 21.25).

James Danandjaja, Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Diskriminasi%20terhadap%20minoritas%20-%20james%20danandjaja.pdf> (diakses tanggal 30 Oktober 2018 pukul 01.24).

Mas Alamil Huda, Agus Raharjo, Definisi Agama Jadi Persoalan, <https://republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/14/11/11/nev4sd33-definisi-agama-jadi-persoalan> pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 13.42.

Ni Made Diska Widayani, Sri Hartati, Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali, Jurnal Psikologi Undip Vol.13 No.2 Oktober 2014.

Nurhadi Sucahyo, Kontroversi Larangan Tionghoa Miliki Tanah di Yogya <https://www.voaindonesia.com/a/kontroversi-larangan-tionghoa-miliki-tanah-diyogya/4275663.html> (diakses tanggal 29 Oktober 2018 pukul 01.32)

Office of the Statewide Equal Employment Opportunity Coordinator (OSEEOC), Religious Discrimination, <https://dbm.maryland.gov/eeo/Documents/EEOBrochures/Religiousrev.pdf> (diakses tanggal 17 Oktober 2018 pukul 21.18).

Pedro Bordalo, Katherine Coffman, Nicola Gennaioli, Andrei Shleifer, “Stereotypes”, diakses dari http://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/stereotypes_june_6.pdf

Sarah V. Wayland, “Immigration, Multiculturalism and National Identity in Canada”, International Journal On Group Rights, 33 Kluwer Academy Publishers. 5; 33-58, 1997.

The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) “ Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, diakses dari <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> (diakses tanggal 30 Maret 2018 pukul 22.00)

U.S Equal Employment Opportunity Commission, Religious Discrimination <https://www.eeoc.gov/laws/types/religion.cfm> (diakses tanggal 17 Oktober 2018 pukul 20.32).

Vivian Jarrett, Why Does Discrimination Occur?, <http://m1psychology.com/why-does-discrimination-occur/> (diakses tanggal 21 September 2018 pukul 22.00).

Yonky Karmann, <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/10/15230451/politik.kewarganegaraan>. (diakses tanggal 29 Oktober 2018 pukul 20.15)

<http://www.mipex.eu/anti-discrimination>, diakses dari tanggal 23 Maret 2018 pukul 13.05.

http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_5/pdf/3.pdf, diakses pada tanggal 09 Oktober 2018 pukul 19.15.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diskriminasi>, diakses pada tanggal 18 September 2018 pukul 18.05.

<https://www.chrc-ccdp.gc.ca/eng/content/what-discrimination>, diakses dari pada tanggal 20 September 2018 pukul 19.23.

www.culturalsurvival.org/who-are-indigenous-peoples diakses pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 18.18.

<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/indigenous-peoples> diakses pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 19.00.

<https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf> diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 13.50.